

ARTIKEL ILMIAH

ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2009-2013



Disusun oleh :

Amanda Rizka Hendyta

128694038

S1 Akuntansi 2012 A

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2015

**ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2009-2013**

Amanda Rizka Hendyta
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya
amandaarizka@gmail.com

Abstact

This research aimed to analyze the financial performance of Lamongan District fiscal year 2009-2013. This research method using descriptive method with secondary data. To measure the performance of this government to use some ratios, including independence ratio, the dependency ratio, the ratio of fiscal decentralization, effectiveness ratio, efficiency ratio, and the ratio of revenue growth. Results of the research showed that the ratio of 10.96% which means the independence of Lamongan district quite independent in funding through the regional interest revenue received. Lamongan District dependency ratio 2009-2013 fiscal year showed an average of 75.22%, which means "Very High". The ratio of fiscal decentralization Lamongan in fiscal year 2009-2013 showed an average 7.61%, which means "Very Less". Effectiveness ratio of regional income have a tendency "Highly Effective" with a 113.4% rate of effectiveness. Efficiency ratio Lamongan 2009-2013 income have a tendency "Less Efficient", with a rate of 94.71% efisiesi. PAD growth but growth slowed from 2010 to 2011. While in 2013 decreased 4.66%.

Keyword : Lamongan District, measurement of financial working performance, regional financial ratio.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2009-2013. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data sekunder. Untuk mengukur kinerja pemerintah ini menggunakan beberapa rasio, diantaranya rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan PAD. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian 10,96% yang berarti Kabupaten Lamongan cukup mandiri dalam membiayai kepentingan daerah melalui PAD yang diterima. Rasio ketergantungan Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan rata-rata sebesar 75,22% yang berarti "Sangat Tinggi". Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan rata-rata 7,61% yang berarti "Sangat Kurang". Rasio efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan "Sangat Efektif" dengan tingkat efektivitas 113,4%. Rasio

efisiensi pendapatan Kabupaten Lamongan 2009-2013 memiliki kecenderungan “*Kurang Efisien*”, dengan tingkat efisiensi 94,71%. PAD mengalami pertumbuhan akan tetapi pertumbuhannya menurun dari tahun 2010 hingga 2011. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan 4,66%.

Kata Kunci : Kabupaten Lamongan , pengukuran kinerja keuangan, rasio keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup dan sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif.

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah menurut Halim (2001) yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber

keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Maka dari itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja keuangan (*performance budget*). Tujuan kinerja keuangan tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi. Masyarakat tentu menghendaki adanya pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kinerja sektor publik.

Beberapa rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi yang dituangkan dalam beberapa rasio. Rasio yang digunakan diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi. Semua komponen yang mendukung perhitungan rasio tersebut

berasal dari laporan Target dan Realisasi Anggaran dari suatu daerah Halim (2001).

Fenomena yang timbul dalam penerapan otonomi daerah, yaitu dimana penerimaan yang didapat disuatu daerah dan belanja daerah yang dikeluarkan setiap daerah jika tidak sesuai akan menimbulkan ketimpangan wilayah antar daerah, hal itu disesuaikan dengan sektor yang dimiliki disetiap daerah. Semua daerah tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Maka dari itu, diharapkan pemerintah daerah terus meningkatkan serta menggali potensi sumber penerimaan yang berasal dari daerahnya, baik dari sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber yang potensial.

Kabupaten Lamongan termasuk salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah masih minim dari tahun ke tahunnya. Terbukti bahwa pada tahun 2010 ke tahun 2011, tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten Lamongan hanya sebesar Rp 4,3 juta setahun atau hanya 4,51% kenaikannya. Padahal selama tahun 2009-2012 PAD Kabupaten Lamongan selalu mengalami kenaikan namun pada RAPBD tahun 2013 total realisasi anggaran PAD menurun sebesar 4,66%. Hal ini menyebabkan sebuah tanda tanya besar tentang bagaimana kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Lamongan selama periode tersebut. Dalam proyeksi RAPBD PAD Kabupaten Lamongan untuk tahun 2013 menembus angka 1,543 T , namun faktanya RAPBD tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp 6 M dari tahun 2012.

Media informasi dan transformasi Suara Lamongan dalam ilustrasinya juga menuliskan bahwa anggota eksekutif telah diserang oleh anggota legislatif saat menyampaikan pembahasan tentang RAPBD tahun 2013. Juru bicara Fraksi Patriot Pembangunan Nurani Nikmatin Fauziah saat membacakan PUnya juga mengatakan, kalau tidak adanya kenaikan PAD yang signifikan, bisa menjadi indikator tidak adanya progresifitas dan ghiro kinerja instansi terkait.

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan diatas, peneliti melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan Pemerintah di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran (2009-2013) dengan menggunakan analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, serta Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengetahui bagaimana kinerja instansi terkait mengenai penurunan PAD pada tahun 2013 tersebut, juga ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan otonomi di Kabupaten Lamongan. Penilaian terhadap akuntabilitas bukan sekedar penilaian kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penilaian kinerja keuangan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi.

Tujuan yang akan dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah di Kabupaten Lamongan selama lima periode (2009-2013) dengan menggunakan analisis Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, serta Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengadakan kebijakan otonomi daerah adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Pemberlakuan otonomi daerah secara efektif adalah pada tanggal 1 Januari 2001.

Tiga dasar sistem hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya adalah :

- a. Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan vertikal di wilayah tertentu.

- c. Tugas perbantuan, penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pelaksanaan asas tugas pembantuan tersebut dimungkinkan tidak hanya terdapat di Pemerintah Daerah dan Daerah kepada desa yang disertai pembiayaan saja, tetapi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban dan pelaksanaan kepada yang menugaskan.

Laporan Target dan Realisasi Anggaran Kabupaten Lamongan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

(Halim, 2012) menyatakan bahwa seperti yang terlihat pada pemerintah pusat, pemerintah daerah pun dalam pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada pemerintah daerah terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam “pengurusan umum”-nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada “pengurusan khusus”-nya.

Kinerja Keuangan Daerah

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi

melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system Mardiasmo (2002:121)

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan catatan pencapaian indikator kinerja, suatu organisasi diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Kegiatan dan program organisasi seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Sehingga untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD yang ditetapkan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penelitian ini, dapat diketahui dengan perhitungan rasio-rasio seperti berikut :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Berikut rasio untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti berikut :

TABEL 1. Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Baik
10,01 – 20,00	Baik
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Kurang
> 50,00	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Rumus untuk menghitung rasio ketergantungan daerah adalah :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa subsidi}} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria untuk menetapkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti berikut :

TABEL 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

Rumus untuk menghitung tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini adalah : Rasio Desentralisasi Fiskal = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$

Sedangkan kriteria untuk menetapkan tingkat desentralisasi fiskal suatu daerah dapat dikategorikan seperti berikut :

TABEL 3. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau seratus (100) persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Berikut rumus untuk mengukur tingkat efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria untuk menetapkan tingkat efektivitas suatu daerah dapat dikategorikan seperti berikut :

TABEL 4. Kriteria Penilaian Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Rasio Efisiensi

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah adalah : Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$

Adapun kriteria untuk menetapkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel yaitu :

TABEL 5. Kriteria Penilaian Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio pertumbuhan (*growht ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk komponen PAD, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian agar PAD dari daerah dapat dioptimalkan.

Rasio pertumbuhan dapat diketahui dengan menghitung rasio dengan rumus : Rasio Pertumbuhan = $\frac{PAD \text{ tahun } x - PAD \text{ tahun } (x-1)}{PAD \text{ tahun } (x-1)} \times 100\%$

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sesuai dengan bentuknya, data yang diolah dan dianalisis selanjutnya akan dideskripsikan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

Menurut Suharsimi (2006), yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi kemudian diolah oleh peneliti.

Data sekunder yang digunakan berupa laporan target dan realisasi anggaran diperoleh dari DISPENDA Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013.

Beberapa data tentunya dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dikenal dengan metode dan pengumpulan data. Metode dan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang di dapat yaitu berupa laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013 yang didapat dari DISPENDA Kabupaten Lamongan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen lain seperti buku

atau bahan referensi yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian jurnal ini.

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis agar dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan secara berurutan adalah dengan mengukur kinerja keuangan Kabupaten Lamongan menggunakan alat ukur dari beberapa rasio diantaranya Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, serta Rasio Pertumbuhan PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan bagian dan perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.

Tabel 6. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Kemandirian
2009	71.452.000.000	731.738.000.000	9,76	Sangat Baik
2010	95.245.000.000	742.952.000.000	12,81	Baik
2011	99.546.000.000	859.150.000.000	11,58	Baik
2012	129.285.000.000	1.006.690.000.000	12,84	Baik
2013	123.257.000.000	1.389.082.000.000	8,87	Sangat Baik
Rata-Rata	518.785.000.000	4.729.612.000.000	10,96	Baik

Sumber: Dispenda Kabupaten Lamongan 2009-2013, Diolah

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 menunjukkan prosentase tingkat kemandirian yang naik turun.

Rasio tingkat kemandirian keuangan diatas menjelaskan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lamongan selama periode anggaran 2009 sampai dengan 2013 sebesar 10,96%. Menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lamongan adalah “*Baik*”. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan selama periode anggaran 2009 sampai dengan 2013 memiliki rata-rata kemandirian keuangan yang baik dan dapat dikatakan tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Meskipun terjadi peningkatan PAD setiap tahun selama tahun anggaran 2009-2012 dan penurunan pada tahun 2013, pemerintah pusat masih memberikan peningkatan dana perimbangan bagi setiap daerah. Sehingga, penerapan kebijakan otonomi daerah yang berlaku tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatann daerahnya.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi. Total penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 7. Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Penerimaan Non Subsidi (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Ketergantungan
2009	71.452.000.000	57.142.000.000	125,04	Sangat Tinggi
2010	95.245.000.000	45.442.000.000	209,59	Sangat Tinggi
2011	99.546.000.000	108.291.000.000	91,92	Sangat Tinggi
2012	129.285.000.000	134.348.000.000	96,23	Sangat Tinggi
2013	123.257.000.000	344.381.000.000	35,79	Cukup
Rata-Rata	518.785.000.000	689.604.000.000	75,22	Sangat Tinggi

Sumber: Dispenda Kabupaten Lamongan 2009-2013, Diolah

Tingkat Ketergantungan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8 menunjukkan peningkatan prosentase yang berfluktuatif. Pada tahun anggaran 2009 tingkat ketergantungan keuangan daerah sebesar 125,04%, mengalami kenaikan pada tahun anggaran pada 2010 yaitu sebesar 209,59% dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 91,92%. Pada tahun 2012 adanya peningkatan prosentase ketergantungan yaitu menjadi 96,23% dan pada tahun 2013 terjadi penurunan yang relatif besar prosentasenya yaitu menjadi 35,79%.

Perubahan prosentase tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan rata-rata prosentase sebesar 75,22% dengan kriteria ”*Sangat Tinggi*”. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui dana perimbangan.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan selama tahun anggaran 2009-2013 diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan daerah.

Tabel 8. Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Tingkat DF
2009	71.452.000.000	942.377.000.000	7,58	Sangat Kurang
2010	95.245.000.000	1.064.028.000.000	8,9	Sangat Kurang
2011	99.546.000.000	1.321.525.000.000	7,53	Sangat Kurang
2012	129.285.000.000	1.472.430.000.000	8,78	Sangat Kurang
2013	123.257.000.000	1.840.089.000.000	6,69	Sangat Kurang
Rata-Rata	518.785.000.000	6.640.449.000.000	7,81	Sangat Kurang

Sumber: Dispenda Kabupaten Lamongan 2009-2013, Diolah

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa rasio desentralisasi fiskal mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil analisis terhadap rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 7,81%. Nilai tersebut diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal adalah bahwa Kabupaten Lamongan dengan tingkat desentralisasi fiskal ”*Sangat Kurang*”.

Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas pendapatan Kabupaten Lamongan 2009-2013 diketahui melalui rasio realisasi pendapatan daerah yang diterima dengan target anggaran.

**Tabel 9. Rasio Tingkat Efektivitas APBD Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2009-2013**

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Target Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Efektivitas
2009	942.377.000.000	856.326.000.000	110,04	Sangat Efektif
2010	1.064.028.000.000	881.981.000.000	120,64	Sangat Efektif
2011	1.321.525.000.000	1.173.178.000.000	112,64	Sangat Efektif
2012	1.472.430.000.000	1.381.852.000.000	106,55	Sangat Efektif
2013	1.840.089.000.000	1.560.306.000.000	117,93	Sangat Efektif
Rata-Rata	6.640.449.000.000	5.853.643.000.000	113,44	Sangat Efektif

Sumber: Dispenda Kabupaten Lamongan 2009-2013, Diolah

Berdasarkan hasil pada tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa selama periode tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013 Kabupaten Lamongan memiliki kecenderungan tingkat efektivitas "*Sangat Efektif*". Hal ini didukung dengan rasio efektivitas selama tahun 2009 sampai dengan 2013 menunjukkan rasio diatas 100%. Pencapaian yang didapat dari Kabupaten Lamongan ini perlu diperhatikan dan dipertahankan.

Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan.

Tabel 10. Rasio Tingkat Efisiensi APBD Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Efisiensi
2009	980.076.000.000	942.377.000.000	104,00	Tidak Efisien
2010	1.044.489.000.000	1.064.028.000.000	98,16	Kurang Efisien
2011	1.285.411.000.000	1.321.525.000.000	97,26	Kurang Efisien
2012	1.471.490.000.000	1.472.430.000.000	99,99	Kurang Efisien
2013	1.507.821.000.000	1.840.089.000.000	81,94	Cukup Efisien
Rata-Rata	6.289.287.000.000	6.640.449.000.000	94,71	Kurang Efisien

Sumber: Dispenda Kabupaten Lamongan 2009-2013, Diolah

Berdasar pada tabel diatas, selama periode tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013, tingkat efisiensi dari belanja Kabupaten Lamongan memiliki kecenderungan “*Kurang Efisien*”. Kecenderungan yang kurang efisien pada dasarnya adalah mendekati pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah daerah kurang cermat dalam mengkalkulasikan kapasitas fiskal daerah serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran kurang optimal.

Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah di capai dari periode ke periode. Berikut adalah tabel rasio perhitungan pertumbuhan PAD Kabupaten Lamongan pada tahun 2009-2013 :

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan PAD (%)
2009	71.452.000.000	-
2010	95.245.000.000	33,29
2011	99.546.000.000	4,51
2012	129.285.000.000	29,87
2013	123.257.000.000	(4,66)

Sumber: Dispenda Kabupaten Lamongan 2009-2013, Diolah

Dari perhitungan, dapat diketahui dalam tabel 11 bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Lamongan mengalami penurunan sebesar 4,66% pada tahun 2013. Pada tahun 2010 sampai dengan 2012 menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan PAD pada tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu dari 4,51% ke 29,87%. Pada tahun anggaran 2013 terjadi penurunan PAD yang memengaruhi persentasenya menurun dari tahun sebelumnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap ukuran kinerja keuangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009-2013 dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kemandirian Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2009-2013 mengalami penurunan, namun rata-rata menunjukkan kategori “*Baik*” yang berarti Kabupaten Lamongan cukup mandiri dalam membiayai kepentingan daerah melalui PAD yang diterima. Tingkat ketergantungan Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2009-2013 rata-rata adalah “*Sangat Tinggi*”. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Lamongan mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Kabupaten Lamongan masih memerlukan bantuan pemerintah pusat melalui Dana

Perimbangan. Tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan rata-rata “*Sangat Kurang*”. Hal ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Lamongan adalah berada dalam kondisi yang relatif baik. Karena perbandingan antara Pendapatan Asli daerah dan Total Penerimaan daerah berada pada rasio dengan nilai sedang.

Tingkat efektivitas pendapatan Kabupaten Lamongan 2009-2013 diketahui melalui rasio antara realisasi pendapatan daerah yang diterima dengan target anggaran. Selama periode tahun anggaran 2009-2013 tingkat efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan “*Sangat Efektif*”. Tingkat efisiensi pendapatan Kabupaten Lamongan 2009-2013 memiliki kecenderungan “*Kurang Efisien*”. Sedangkan untuk pertumbuhan PAD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2009-2012 mengalami pertumbuhan akan tetapi pertumbuhannya menurun pada tahun 2010-2011 dan mengalami penurunan di tahun 2013.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

----- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, ANDI, Yogyakarta

Laporan Tahunan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan

Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.

Susanto, Hery dan I Wayan Gede Bisma .2008. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2003-2007. Universitas Mataram.

Nur Habibah. 2014. Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009-2013. Universitas Negeri Surabaya.

Alayyal Khikmah. 2014. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money. Universitas Negeri Surabaya